

KONSEP HISTORISITAS FILSAFAT PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Misnal Munir

Staf Pengajar Fakultas Filsafat UGM dalam mata kuliah Filsafat Barat I

Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1995 ini genap berusia 50 tahun. Ini berarti telah 50 tahun pula bangsa Indonesia menghayati dan mengamalkan Pancasila secara formal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Negara pada tanggal 18 Agustus 1945, telah banyak dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap Pancasila, baik secara yuridis-ideologis maupun ilmiah-filsafati. Berbagai tesis dan disertasi telah mengkaji Pancasila dari sudut pandang disiplin ilmunya masing-masing. Namun sejauh yang penulis ketahui belum ada penulis yang membahas tentang filsafat sejarah Pancasila atau historisitas dalam Filsafat Pancasila.

Berhubungan dengan masalah di atas, Soedjatmoko mengatakan bahwa sudah selayaknyalah apabila suatu bangsa pada suatu titik perkisaran sejarah, mempertanyakan kembali tentang jatidirinya sebagai bangsa. Pertanyaan ini penting karena memberikan kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, yang timbul dari situasi yang baru pula (Soedjatmoko, 1984:16). Menghadapi situasi baru itu, suatu bangsa perlu menyusun suatu konsep tentang sebuah masyarakat baru. Penyusunan konsep tentang masyarakat baru memerlukan suatu Filsafat Sejarah Nasional, yang dapat membawa ke arah pemahaman tentang makna historisitas bagi bangsa, terutama bagi Indonesia yang sedang giat melaksanakan pembangunan. Penyusunan dan penegasan tentang suatu Filsafat Sejarah Nasional, semakin penting ditengah-tengah ketidak-tentuan historisitas universal ditengah arus globalisasi.

Filsafat Sejarah Nasional adalah sebuah konsep yang mengandung wawasan kebangsaan, yang diharapkan dapat menjelaskan statika dan dinamika perkembangan sejarah suatu bangsa. Aspek statika mengacu pada nilai dasariah, sesuatu yang harus dipertahankan demi kelangsungan eksistensi bangsa yang

bersangkutan. Aspek dinamika mengacu pada cara-cara suatu bangsa mengembangkan historisitasnya untuk menghadapi tantangan jaman. Pancasila sebagai landasan filsafat sejarah nasional Indonesia, mengandung aspek statika dan dinamika sebagaimana akan dikemukakan pada bagian selanjutnya.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia, dalam pengamalannya merupakan penuntun setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai penuntun tindakan subjektif individual agar tercapai kehidupan harmonis antar warganegara yang berbeda suku bangsa dan agama. Pancasila sebagai Dasar Negara menjadi penuntun bagi setiap penyelenggaraan kenegaraan yang terwujud dalam peraturan-peraturan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Dengan demikian Pancasila merupakan dasar pokok yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur baik lahiriah maupun batiniah.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, selain sebagai pemersatu bangsa juga merupakan dasar moral bagi pembangunan Nasional Bangsa Indonesia.

Konsep Manusia Dalam Filsafat Pancasila

Pembangunan menempatkan manusia sebagai subjek pendukung, sekaligus objek yang hendak dibangun. Peranan manusia sebagai subjek pembangunan sangat menentukan model pembangunan yang berwawasan dan berwajah kemanusiaan. Oleh karena itu perbincangan tentang konsep filsafat sejarah nasional Indonesia itu harus bertitik tolak dari konsep manusia Indonesia seutuhnya. Manusia adalah pembentuk dan penghasil sejarah, bersamaan dengan itu ia sekaligus juga dibentuk dan dipengaruhi oleh sejarah itu sendiri (Bertens, 1987:200). Oleh karena itu pada hakikatnya semua permasalahan disekitar faktor kemanusiaan, tidak hanya sebagai unsur objektif, tetapi juga selaku unsur subjektif (Sartono Kartodirdjo, 1990:252). Manusia merupakan faktor utama dalam pembahasan tentang historisitas. Sebab pandangan yang berbeda tentang manusia dan tujuan hidupnya akan melahirkan pandangan yang berbeda pula terhadap makna historisitas.

Soerjanto (1989: 141) mengemukakan bahwa ditinjau dari isi hakikinya, maka pada dasarnya Pancasila merupakan orientasi manusia. Ideal Pancasila ialah manusia yang integral, etis dan religius. Dengan kata lain, manusia ditentukan oleh dimensi horisontal dan vertikal. Secara horisontal ia merupakan kesatuan struktural dengan sesama dan lingkungannya, dan secara vertikal ia terarah pada Yang Mutlak. Seluruh tingkah lakunya mendapatkan kualifikasi dan maknanya sejauh dilaksanakan dalam penghayatan kedua dimensi itu.

Notonagoro (1987: 95) mengatakan bahwa hakikat manusia itu bersifat monopluralis. Hakikat manusia merupakan keutuhan, keseluruhan, diri, dengan susunan atas raga dan jiwa dalam kedua-tunggalan, sifatnya sebagai individu dan pribadi

bermasyarakat atau makhluk sosial, serta kedudukan hakikatnya pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan.

Manusia menurut susunan kodratnya merupakan makhluk jasmani dan rohani, menurut sifat kodratnya manusia merupakan makhluk individu dan sosial, serta menurut kedudukan kodrat manusia adalah makhluk pribadi yang berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Konsep manusia monopluralis inilah yang menjadi landasan dalam menyusun konsep Filsafat Sejarah Nasional Indonesia.

Susunan kodrat manusia terdiri atas raga dan jiwa yang keduanya merupakan unsur mutlak, sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Unsur raga manusia bersifat fisis-biologis, sehingga manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang nyata, namun memiliki tuntutan dan insting secara biologis. Di samping itu manusia memiliki unsur jiwa yang merupakan tingkatan tertinggi apabila dibandingkan dengan makhluk biologis lainnya. Manusia dalam kesatuan raga dan jiwa mengalami taraf-taraf kesadaran yang berbeda. Anton Bakker (tt: 23) menunjukkan empat taraf di dalam diri manusia, yaitu: (1) taraf fisiko-kemis (*gamping, air, listrik*); (2) taraf biotis (*sel, jaringan tubuh, hidup*); (3) taraf psikis (*persepsi, nafsu, emosi, naluri, mekanisme psikis*); dan (4) taraf sadar-refleksif (*human, budaya pribadi*).

Di samping taraf-taraf seperti tersebut di atas, manusia dengan unsur jiwa yang bersifat rohani memiliki tiga unsur potensi, yaitu akal, rasa dan kehendak (Notonagoro, 1957:94). Akal merupakan hakikat jiwa yang berkaitan dengan potensi manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Akal merupakan sumber intelektual manusia untuk mempelajari dirinya, lingkungan, alam semesta, dan memikirkan ciptaan Tuhan lainnya. Rasa merupakan hakikat jiwa manusia yang berkaitan dengan potensinya dalam bidang keindahan. Manivestasi keindahan itu diekspresikan dalam bentuk kesedih-an, kegembiraan, kekaguman terhadap semua ciptaan Tuhan. Kehendak merupakan unsur hakikat

kejiwaan yang berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia untuk merealisasikan dirinya dalam mengatasi tantangan hidupnya dalam sejarah.

Manusia yang memiliki hakikat jiwa-badan di dalam hidupnya tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan manusia lainnya, sehingga manusia pada hakikatnya juga merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu membutuhkan berbagai keperluan dalam hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak dapat sendirian, tetapi ia membutuhkan pertolongan orang lain. Leahy (1989:212) mengatakan bahwa manusia adalah makhluk komunikasi dan persekutuan, tiap orang berada dalam suatu hubungan dengan orang lain, tiap orang itu sosial baik karena keterbatasannya maupun karena kekayaannya.

Hakikat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai pribadi memiliki kebebasan untuk berkreasi dalam hidupnya. Kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi bersifat otonom dalam berkehendak dan berbuat. Manusia merencanakan dan melaksanakan kegiatan hidupnya untuk masa depan, akan tetapi manusia harus menyadari bahwa segala putusan akhir tidak terletak ditangannya, melainkan dalam tangan Tuhan. Ini berarti manusia dapat merencanakan apa saja, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Manusia sebagai pribadi yang bebas, tidak hanya mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya terhadap sesamanya, tetapi semua perbuatan itu harus dipertanggungjawabkannya dihadapan Tuhan.

Manusia menghayati historisitas atau kesejarahannya dalam kedudukannya sebagai makhluk monopluralis. Historisitas manusia berkembang seimbang antara aspek jasmani dengan aspek rohani. Manusia dalam historisitasnya tidak hanya membutuhkan perkembangan aspek materialitas, tetapi selalu diimbangi dengan perkembangan aspek spiritualitas. Manusia dalam membuat sejarah tidak pernah sendirian, tetapi selalu dalam

kebersamaan dengan manusia lain. Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai suatu hasil sejarah tidak dibuat sendirian oleh Bung Karno atau Bung Hatta, tetapi merupakan perjuangan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan masyarakat Indonesia tidak semata-mata berkat usaha manusianya, tetapi lebih dari itu kemerdekaan merupakan karunia dan rahmat Tuhan.

Historisitas Dalam Filsafat Pancasila

Kees Bertens (1987:193-198)

mengemukakan sekurang-kurangnya ada empat aspek yang selalu terdapat dalam historisitas. Pertama, historisitas manusia hanya dapat berlangsung dalam perkembangan yang harmonis antara unsur materialitas dengan unsur spiritualitas. Kedua, historisitas dapat berlanjut jika manusia bebas dalam merealisasikan diri. Ketiga, historisitas selalu berkaitan dengan waktu dan temporalitas yang selalu kontinu. Keempat, historisitas hanya dapat terjadi jika manusia berkarya bersama-sama dalam kelompoknya.

Historisitas manusia sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Historisitas bangsa Indonesia juga muncul dari solidaritas kelompok menentang kolonialisme. Kolonialisme telah menimbulkan berbagai penderitaan bagi bangsa Indonesia, sehingga melahirkan rasa kebersamaan, yang pada akhirnya memunculkan paham kebangsaan. Solidaritas dan rasa kebersamaan yang melahirkan nasionalisme itu tertuang dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Sumber pemikiran tentang historisitas Pancasila

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber bagi pemikiran tentang historisitas dalam Filsafat Pancasila. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa isi Pembukaan selain menegaskan pembebasan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, di dalamnya juga terdapat dasar kerohanian negara, yakni Pancasila. Notonagoro (1962: 49) dalam Pidato Dies Natalis

Universitas Airlangga yang pertama menegaskan sebagai berikut:

"Dari pembicaraan tentang isi Pembukaan telah dapat ditemukan di dalamnya pokok-pokok dasar kerohanian, merupakan angan-angan yang dalam, cita-cita yang mulia serta asas kesusilaan yang tinggi, dan dasar keyakinan religius, serta asas kerohanian Pancasila".

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dari Piagam Jakarta, yang pada mulanya merupakan naskah deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai realisasi dari janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia.

Alinea pertama Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mencerminkan sejarah masa lampau yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu situasi dan kondisi penjajahan. Situasi dan kondisi penjajahan telah melahirkan suatu semangat kebangsaan dan rasa kemanusiaan. Keadaan terjajah merupakan dasar bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan suatu masa depan yang lebih baik. Karena penjajahan dalam segala bentuk eksploitasinya telah memiskinkan rakyat Indonesia, baik material maupun spiritual. Di dalam alinea pertama tersebut juga tergambar pandangan bangsa Indonesia tentang hakikat manusia. Manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok bangsa menurut kodratnya dilahirkan bebas dan merdeka. Oleh karena itu penjajahan dalam bentuk apapun melanggar hak-hak asasi manusia.

Manusia, baik perorangan maupun bangsa, merasa terdorong oleh kecenderungan yang tiada habisnya untuk merealisasikan diri. Tujuan kecenderungan itu ialah kemerdekaan, otonomi, kedewasaan. Cita-cita kepribadian yang merdeka dan berdiri sendiri itulah yang dimaksudkan dengan kata "kebebasan" dalam arti luhur. Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup manusia adalah kepribadian atau kedirian yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga manusia bebas dari beraneka alienasi yang menekannya, dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tak tercela, berdikari dan kreatif. Pendek kata, kebebasan merupakan kesempurnaan eksistensi manusia

(Dister, 1988:47 48³³). Kebebasan dalam suatu kelompok bangsa merupakan upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan merupakan modal dasar bagi manusia untuk mengembangkan kreativitas menuju ke keadaan yang baik.

Masa lampau sebagai landasan historisitas juga berlaku bagi kelompok bangsa. Bangsa Indonesia, misalnya menjadikan masa penjajahan dan perjuangan kemerdekaan sebagai sebagai titik tolak Pembangunan. Artinya pengalaman masa lampau itu menjadi motivasi pokok untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pengalaman dijajah oleh bangsa lain, menjadi titik tolak untuk membangun solidaritas bangsa menuju kesejahteraan bersama. Pengalaman dijajah ini menjadi landasan untuk membangkitkan rasa persatuan atau nasionalisme. Kesadaran terhadap masa lampau diperlukan sebagai modal untuk membangun masa depan. Soedjatmoko (1983:71) memandang perlunya generasi muda mengetahui lebih banyak mengenai revolusi dan pembangunan di dalam sejarah bangsa-bangsa lain. Mereka juga perlu tahu jauh lebih banyak mengenai revolusi Indonesia, sebagai sumber akar-akar kesadaran dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Tetapi di samping itu perlu juga dibangkitkan kesadaran sejarah terhadap generasi muda itu. Suatu pengertian mengenai luasnya kanvas di mana sejarah melukiskan gambaran-gambaran untuk ditarik sari dan intinya oleh umat manusia. Suatu bangsa yang sedang membangun tidak hanya membuat sejarah, tetapi ia juga dibuat, diwujudkan, dipengaruhi oleh sejarah. Kendatipun dipengaruhi dan diwujudkan oleh sejarah, namun sejarah merupakan fakta yang tidak dapat diingkari dalam memperkembangkan diri, manusia dan suatu bangsa bukan dipenjarakan oleh sejarah. Sejauh manusia dan bangsa itu mengerti sejarah, berarti ia mampu memperkembangkan kesadaran sejarah, sejauh ia mampu mengatasi kabut kegelapan, ketidaktahuan, yang meliputi situasi hari kininya. Kesadaran sejarah membuat kabut itu lebih terang. Dia membikin kabut itu tembus

pandang, dan dengan demikian itu kesadaran sejarah mampu untuk membebaskan manusia dan bangsa itu dari determinisme sejarah".

Penolakan Soedjatmoko terhadap determinisme sejarah, menunjukkan pentingnya peran kreativitas dalam historisitas bangsa. Bangsa Indonesia telah membuktikan kreativitasnya itu melalui perjuangan yang terus-menerus, merebut kembali kemerdekaan yang dirampas oleh bangsa Barat.

Alinea kedua menggambarkan dinamika dan kreativitas bangsa Indonesia dalam menggerakkan roda sejarah. Dinamika dan kreativitas itu tereksresi dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan, yang harus diperjuangkan terus-menerus. Bangsa Indonesia tidak dapat menerima eksploitasi oleh bangsa lain, sehingga bertekad memperjuangkan hak-haknya untuk membentuk suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia dengan kemerdekaan dan kedaulatan itu hendak mewujudkan suatu masyarakat yang lebih baik daripada masa lampau. Masyarakat yang hendak dicita-citakan itu ialah masyarakat adil dan makmur, artinya suatu masyarakat yang mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, kesejahteraan hidup baik lahir dan batin.

Kreativitas yang telah terbukti sebagai unsur pokok dalam dinamika perkembangan historisitas bangsa, sehingga dengan itu bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan dan pembebasan dirinya dari segala bentuk penjajahan. Unsur kreativitas juga menunjukkan perannya pada saat bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, dan seharusnya tetap terus dipertahankan untuk pembangunan masa depan bangsa.

Alinea ketiga merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Notonagoro (1962:23) menjelaskan makna alinea ketiga sebagai berikut.

"Bagian Pembukaan yang ketiga ini memuat, bahwa Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan itu atas kekuatan sendiri, yang didukung oleh seluruh rakyat, dan untuk kepentingan serta untuk

kebahagiaan seluruh rakyat, lagi pula merupakan suatu tindakan kerohanian yang saleh dan suci, karena melaksanakan hak kodrat dan hak moril akan kemerdekaan, dan segala sesuatu itu dimungkinkan karena karunia Tuhan pula".

Hak kodrat adalah suatu ketentuan alamiah yang secara niscaya ada pada setiap manusia atau kelompok, yaitu kebebasan dan kemerdekaan. Manusia menurut hak kodratnya dilahirkan bebas (Rousseau, 1986:5). Hak moril adalah keharusan manusia untuk menghormati hak-hak sesamanya.

Kemerdekaan itu merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia yang didorong oleh semangat persatuan. Kemerdekaan merupakan buah dari kreativitas manusia Indonesia sebagai pribadi yang bebas. Makna alinea ketiga selain menggambarkan dinamika dan hasil perjuangan bangsa Indonesia sebagai kemerdekaan juga mengisaratkan bahwa segala kejadian dalam proses historisitas manusia tidak pernah lepas dari ketentuan Tuhan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius meyakini bahwa manusia dapat menggerakkan 'roda' historisitasnya yang didukung oleh kedudukannya sebagai pribadi yang bebas, namun hasil akhir dari usaha kreativitas manusia itu pada akhirnya ditentukan oleh Tuhan. Artinya masa depan sebagai harapan senantiasa mengandung misteri yang tidak dapat diungkap sepenuhnya oleh manusia. Manusia selalu berada antara dua kutub ekstrim, yaitu kebebasan berkebudayaan dan takdir Tuhan.

Alinea keempat merupakan proyeksi bangsa Indonesia akan masa depan. Masa depan yang hendak dituju sebagai realisasi dari kemerdekaan yang telah dimiliki ialah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia; (2) mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat pembukaan ini mengandung pesan agar kemerdekaan sungguh merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat ideal. Norma untuk mewujudkan masyarakat ideal itu berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang

Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan

Dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lima dasar ini dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila sendiri memang tidak merumuskan masa depan secara eksplisit. Pancasila membiarkan masa depan itu terbuka untuk ditentukan dan dibangun secara bersama-sama oleh semua anggota masyarakat Indonesia (Eka Darmaputra, 1992:147). Sila ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan merupakan landasan pokok kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung dimensi teologis, antropologis, dan historis. Sila kerakyatan merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila keadilan mengandung dimensi teleologis, yaitu mencapai cita-cita masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Notonagoro menjelaskan bahwa kesatuan sila-sila dalam Pancasila mencerminkan lima unsur majemuk tunggal. Artinya setiap sila Pancasila secara otomatis mengandung sila-sila lainnya. Misalnya sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah ke-Tuhanan yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan (Notonagoro, 1987:9-10). Ini berarti Pancasila sebagai dasar falsafah Negara senantiasa terbuka bagi interpretasi yang menyangkut masa depan bangsa. Keterbukaan itu membutuhkan kreativitas, namun tidak menghilangkan kepribadian nasional.

2. Makna Kepribadian dan kreativitas dalam Filsafat Pancasila

Kepribadian manusia terbentuk melalui proses dinamika kehidupan. Kepribadian itu dibentuk oleh tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan eksistensinya yang bebas. Kehidupan manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan itu menjadikan manusia sadar akan eksistensi pribadinya. Antisipasi terhadap tantangan itu didasari dan ditentukan oleh wawasan pribadinya. Wawasan pribadi sangat ditentukan oleh pandangan hidup

yang diyakininya, dalam kehidupannya sebagai anggota kelompok atau bangsa. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mempengaruhi kepribadian manusia Indonesia.

Wawasan Pancasila mengakui bahwa manusia adalah pribadi yang otonom. Manusia menurut istilah pemikiran modern di bidang antropologi diakui sebagai persona, bukan hanya sebagai individu. Pengakuan terhadap manusia sebagai seorang pribadi atau persona, menurut Soerjanto-Poespowardojo (1989:45-46) mempunyai pelbagai implikasi makna sebagai berikut.

a. Pribadi manusia Diakui Unik

Pengakuan di atas berarti bahwa manusia perorangan diakui sebagai unik, tidak ada kembarnya. Keunikan setiap orang diterima secara positif; keunikan tersebut, memberikan nilai tertentu yang patut dihargai.

b. Manusia Bermartabat

Hanya manusia yang disebut "person". Hewan dan makhluk lainnya tidak pernah disebut demikian. Manusia sebagai pribadi adalah luhur, justru karena ia seorang manusia. Martabat manusia diperoleh karena kemanusiaan itu sendiri.

c. Manusia Makhluk Etis

Karena manusia dihargai sebagai pribadi, maka nilai-nilai moral dihargai dan dijunjung tinggi justru karena martabat manusia sebagai seorang persona.

d. Keluhuran dari Atas

Pengakuan terhadap manusia sebagai pribadi mempunyai sifat khas yaitu mengakui bahwa keluhuran manusia berasal dari "atas". Keluhuran manusia tidaklah disimpulkan dari lebih tingginya manusia dibandingkan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam. Keluhuran manusia diterima dari atas, yaitu karena memang diciptakan demikian oleh Tuhan.

e. Terbuka untuk Masa Depan

Mengakui manusia sebagai pribadi berarti mengakui bahwa manusia merupakan wujud yang terbuka untuk masa depan. Salah satu sifat khas yang menyangkut keterbukaan pada masa depan

itu ialah kepercayaan akan hidup akhirat. Perwujudan kepercayaan itu bervariasi, tergantung dari kebudayaan. Intinya adalah pengakuan bahwa di dalam diri manusia sebagai person, terdapat unsur abadi. Dari sudut keterbukaan dan keabadian ini, manusia nampak sebagai wujud yang berkehendak bebas dan berakal budi.

Persona atau pribadi tidak hanya untuk manusia perorangan, tetapi juga mengenai manusia sebagai kelompok. Keunikan tidak hanya dimiliki oleh kepribadian manusia sebagai perseorangan, tetapi juga dimiliki oleh kepribadian manusia sebagai kelompok bangsa.

Kepribadian suatu bangsa diwujudkan oleh pengalaman sejarahnya, dan jawaban-jawaban yang diberikan atas masalah-masalah yang akan timbul dalam hubungannya dengan pembangunan masa depan (Soedjatmoko, 1983:31). Hal ini berarti kepribadian bangsa merupakan suatu kenyataan relasional yang dibentuk oleh kesadaran sejarah. Kepribadian bangsa merupakan endapan refleksi yang terus-menerus, yang muncul dari sikap mawas diri dan usaha merenungkan hakikat dirinya sebagai bangsa, yang didorong oleh suatu keaktifan yang tidak ada hentinya. Sumber kepribadian itu ialah rasa dan harga diri sebagai bangsa, dan pada gilirannya kepribadian itu merupakan sumber vitalitas dan kreativitas suatu bangsa. Dua hal ini saling berkaitan, sebab kreativitas tanpa harga diri tidak akan berakar pada kenyataan yang ada, sebaliknya harga diri tanpa kreativitas tidak bermakna (Soedjatmoko, 1983:64-65). Dengan demikian kepribadian bangsa, di satu pihak memiliki nilai-nilai statis, sedangkan dipihak lain memiliki sifat dinamis yang tampak dalam kreativitasnya. Nilai-nilai statis kepribadian bangsa Indonesia itu mengandung unsur-unsur religius, human, persatuan, musyawarah dan keadilan (Koento Wibisono, 1986:39). Sifat dinamisnya terwujud dalam upaya melaksanakan pembangunan yang terus-menerus.

Manusia bertindak kreatif, baik terhadap dirinya maupun terhadap alam sekitarnya. Manusia tidak hanya menerima keadaan seperti

apa adanya, melainkan mengubahnya menjadi keadaan yang sesuai bagi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Tindakan kreatif ini membuktikan kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan alam. Kesadaran manusia dapat mengubah distansi terhadap alam sekitarnya, sehingga ia tidak tenggelam di dalamnya, bahkan mampu mengatasi dan memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, menilai dan mengatur objek yang dihadapinya, menurut pandangan dan rencananya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakannya (Soerjanto-Poespowardjo, 1989:63).

Tindakan kreatif mengejawantah dalam bentuk kerja. Kerja tidak hanya diartikan sebagai aktivitas ekonomis, melainkan sebagai keseluruhan aktivitas manusia yang mengolah dunia kasar, sehingga menjadi dunia kebudayaan untuk kepentingan dirinya. Kerja mempunyai arti yang hakiki, karena merupakan ekspresi pribadi manusia dalam proses pembudayaan dirinya. Kerja merupakan proses pembentukan kepribadian manusia. Aktifitas manusia dalam kerja dapat dipengaruhi atau mempengaruhi tujuan hidupnya. Kerja yang dipengaruhi oleh tujuan hidup melahirkan manusia kreatif, sebab manusialah yang merencanakan tujuan hidupnya di masa depan. Sebaliknya, kerja yang mempengaruhi tujuan hidup melahirkan manusia 'nrimo', yang kurang kritis dalam merancang masa depan. Manusia yang mampu menentukan tujuan hidupnya sebelum melakukan suatu tindakan, adalah manusia yang memiliki rencana. Manusia yang memiliki rencana berarti memahami arah dan makna perkembangan hidup.

3. Makna Perkembangan Dalam Filsafat Pancasila

Makna perkembangan dalam pengertian filsafat Barat sangat bernada 'optimistik' yang mendapat konotasi sebagai kemajuan atau progress (Koento Wibisono, 1983:98). Sikap optimistik itu telah dimulai sejak jaman Aufkl□rung di Barat, ketika manusia yakin bahwa dengan ilmu pengetahuan ia dapat meramalkan

masa depan. Sikap optimistik itu kemudian menjadi ciri masyarakat modern, yang melangkah pasti ke arah masa depan. Masa depan dalam pandangan manusia modern dapat direncanakan, direkayasa, bahkan dipastikan corak dan bentuknya. Keyakinan ini semakin kuat tatkala manusia dengan kemampuan akal pikirnya, menciptakan berbagai teknologi untuk mendukung cita-cita dan impian di masa depan.

Cairns membedakan 4 pendapat tentang makna perkembangan dalam historisitas. Pertama, dalam sejarah tidak ada progress, sejarah berjalan siklis dan setiap peristiwa selalu berulang kembali. Kedua, sejarah bergerak ke depan secara linear. Ketiga, pandangan skeptis tentang sejarah yang menganggap tidak ada kepastian tentang masa depan. Keempat, pandangan sejarah spiral yang menggabungkan pandangan siklis dan linear (Peursen dkk, 1980:20). Kelima, teori takdir, yang menganggap bahwa semua perkembangan sejarah ditentukan oleh takdir Tuhan (Frederick dan Soeri-Suroto, 1982:12).

Pandangan sejarah siklis memperlihatkan kelemahan dalam proses gerak ke depan, sehingga menimbulkan sikap fatalistik dan pasrah. Pandangan sejarah linear memperlihatkan kelemahan yang mendasar berkenaan dengan sikap optimistik manusia modern. Kemajuan hanya diukur secara matematis, sehingga terjadi dehumanisasi. Pandangan sejarah skeptis memperlihatkan kelemahan dalam hal keraguan akan adanya masa depan yang lebih baik. Pandangan ini muncul sebagai akibat dari dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hidup manusia, sehingga dimensi moral dan spiritual terabaikan. Pandangan tentang gerak sejarah yang cukup memadai adalah pandangan yang spiral. Pandangan spiral tentang gerak sejarah mengakui bahwa ada aspek-aspek masa lampau yang mempengaruhi perkembangan sejarah, tetapi manusia sendiri memiliki kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi masa depannya. Pandangan yang mengatakan bahwa semua gerak sejarah ditentukan Tuhan, memberikan harapan pada manusia akan adanya

pertolonganNya, namun pandangan ini dapat mengakibatkan hilangnya kreativitas.

Pandangan ideal tentang historisitas, adalah penggabungan antara pandangan spiral dengan pandangan takdir. Pandangan ini mengakui bahwa dalam historisitas manusia, perkembangan dan kemajuan tidak hanya ditentukan oleh manusia sendiri, tetapi ada 'campur tangan' Tuhan dalam bentuk rahmat dan karunia. Pandangan ini menampakkan adanya sintesis antara unsur kreativitas manusia dan kehendak Tuhan. Makna perkembangan dalam historisitas Pancasila yang dipahami berdasarkan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan gabungan antara pandangan spiral dan takdir. Pandangan filsafat Pancasila tentang historisitas manusia, bertumpu pada keyakinan bahwa historisitas manusia yang bergerak dari masa lampau ke masa depan, ditentukan oleh upaya manusia yang bebas dan kreatif, namun hasil akhir ada di tangan Tuhan. Bukti nyata tentang sintesis pandangan spiral dan takdir dalam kehidupan bangsa Indonesia terwujud dalam kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, selain merupakan perjuangan bangsa Indonesia yang kreatif, juga merupakan rahmat dan karunia Tuhan. Dengan demikian makna perkembangan dalam filsafat Pancasila adalah kemajuan yang seimbang antara aspek materialitas dan spiritualitas atau aspek lahiriah dan batiniah dalam ridho Tuhan.

Bangsa Indonesia yang telah memiliki kemerdekaan dapat merencanakan dan merealisasikan masa depan yang lebih baik. Masa depan itu akan berjalan sesuai dengan harapan, manakala ada kerangka acuan yang jelas. Kerangka acuan itu dituangkan dalam bentuk garis-garis besar haluan negara sebagai landasan pembangunan nasional.

Pembangunan Sebagai Pengembangan Historisitas

Berdasarkan pemahaman tentang konsep manusia dan makna perkembangan dalam filsafat Pancasila, maka pembangunan sebagai upaya

manusia Indonesia untuk mengembangkan historisitasnya menuju ke arah masa depan yang lebih baik di Indonesia semestinya diletakkan dalam kerangka perkembangan peradaban dan kebudayaan. Pemilahan ini penting, mengingat pemakaian istilah kebudayaan untuk mencakup hal-hal yang bersifat material dan spiritual, menimbulkan banyak kesulitan. Kesulitan terletak pada tumpang tindihnya pemahaman tentang arah kemajuan, apakah arah kemajuan lebih pada aspek material atau pada aspek spiritual, yang berarti lebih beradab atau berbudaya.

Pembangunan di Indonesia seyogyanya diletakkan dalam dua aspek, yakni membangun peradaban di satu pihak, dan membangun kebudayaan di pihak lain. Membangun peradaban berarti pembangunan dititik beratkan pada hal yang bersifat fisik-material, seperti: pembangunan ekonomi dengan tekanan pada pemenuhan kebutuhan fisik, pembangunan sarana-sarana hidup manusia atau infrastruktur yang berwujud jembatan, gedung-gedung, dan sebagainya. Membangun kebudayaan berarti pembangunan dititik beratkan pada hal-hal yang bersifat mental-spiritual, seperti: peningkatan moral, ketaatan beragama, seni, dan sebagainya. Pembangunan yang ideal dalam rangka mengembangkan historisitas bangsa Indonesia, seyogyanya berjalan secara seimbang antara kebudayaan dan peradaban.

Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus mampu menciptakan pertumbuhan dan kemajuan bagi seluruh bangsa secara terpadu. Keterpaduan ditentukan oleh wawasan yang mampu melihat pembangunan dari segala aspek, sehingga bermakna bagi bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan sosial, sedangkan perencanaan sosial diletakkan dalam konteks strategi kebudayaan (Soerjanto-Poespowardjo, 1991:61). Pembangunan fisik-ekonomik yang terletak dalam kawasan peradaban, harus selalu berada dalam kerangka pembangunan kebudayaan yang bersifat

moral dan spiritual. Dengan demikian pembangunan sungguh-sungguh menjadi wahana bagi peningkatan kualitas martabat manusia Indonesia.

Pembangunan senantiasa terkait dengan masa depan. Manusia membangun masa depannya melalui rencana-rencana yang disusunnya secara seksama dan matang. Manusia dengan kemampuan akalnyanya membuat proyeksi ke masa depan. Jacob (1991:28) mengatakan bahwa dalam hubungan dengan masa depannya manusia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menanti masa depan datang dan menerima apa saja dengan tabah. Masa depan tak dapat diubah manusia. Yang dapat dipengaruhi sedikit adalah masa sekarang, tetapi ini pun sangat terbatas. Jalan yang menenangkan dan menyenangkan ialah serahkan diri, apa pun yang akan datang pasti ada hikmahnya.

2. Menyongsong masa depan. Kita mengetahui bahwa masa depan itu ada dan akan tiba, serta pasti ada hal-hal yang baik dan buruk di dalamnya, yang akan kita hadapi. Dengan menyongsongnya kita akan lebih lekas mengetahui dan memikirkan cara-cara untuk menerimanya.

3. Meramal masa depan dengan mengamati kecenderungan-kecenderungan sekarang. Ramalan pasti tidak akan benar seluruhnya, bahkan mungkin seluruhnya akan keliru, tetapi biasanya ada hal-hal yang terbukti dalam ramalan-ramalan "terpelajar", yang dilakukan dengan pengalaman di masa lampau.

4. Mempersiapkan diri untuk masa depan dengan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, yang baik maupun yang buruk, berdasarkan pengamatan kecenderungan di masa sekarang, sehingga kalau tak dapat lebih baik, masa depan tidak akan lebih buruk daripada masa sekarang.

5. Mengubah masa depan dengan memilih mana yang baik dari kemungkinan-kemungkinan dan memperbesarnya (mengamplifikasi) serta menghindari atau melenyapkan yang merugikan sebelum masa depan tiba.

6. Akhirnya mencipta masa depan dengan membuat kecenderungan-kecenderungan atau mengubah lingkungan sehingga masa depan terarah kejurusan yang diinginkan, yang sebetulnya tidak atau belum akan terjadi.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa masa depan sepenuhnya ada ditangan manusia. Manusia dapat memilih dan menentukan masa depannya dari berbagai kemungkinan. Pilihan itu tentu saja akan menentukan wajah masa depan yang sesuai dengan cita-citanya. Bangsa Indonesia menyongsong masa depan dengan tetap berpijak pada sejarah masa lampau, untuk kemudian merencanakan masa depan sembari memperhatikan kondisi lingkungan budaya.

1. Hubungan Pembangunan dan Historisitas

Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan bangsa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, sehingga pembangunan selalu terkait dengan historisitas. Pembangunan nasional juga tidak boleh dilihat lepas dari alur sejarah bangsa yang berkesinambungan. Dilihat dalam perspektif sejarah, era pembangunan merupakan riak dalam gelombang satu dari peredaran sejarah ke peredaran sejarah yang berikutnya. Oleh sebab itu, dalam menilai pembangunan harus diperhitungkan, sejauh mana riak dan alun sejarah bangsa ini benar-benar melanjutkan aspirasi bangsa, yang sudah diungkapkan dan dicanangkan dalam fase sejarah terdahulu, dan yang diharapkan menjadi kenyataan dalam fase-fase sejarah berikutnya. Titik historis dari era pembangunan, apabila dipelajari akan dapat menjadi dasar dan pedoman bagi kegiatan pembangunan (Riberu, 1986:373).

Historisitas dan Pembangunan adalah dua hal yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Historisitas merupakan cara berada khas manusia dalam menghayati hidupnya, sedangkan pembangunan merupakan konsep yang direalisasikan manusia sebagai aktifitas untuk mengarahkan jalan kehidupannya. Historisitas manusia tampak pada cara ia melaksanakan pembangunan, sementara itu pembangunan adalah perwujudan dari historisitas manusia menuju ke

arah yang lebih baik sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Soedjatmoko (1983:66) menegaskan hubungan antara pembangunan dan historisitas. Pembicaraan tentang pembangunan dan proses pembangunan, berarti membicarakan mengenai suatu konsepsi sejarah, yang terbuka, yang open ended. Konsepsi sejarah yang terbuka berarti suatu pandangan sejarah yang bukan siklis, dan yang bukan a historis, yaitu yang memandang kehidupan manusia dalam kekinian yang kontinu. Pembicaraan mengenai pembangunan mengandung kedalaman arti, kalau diletakkan dalam konteks sejarah dan harus diwujudkan oleh keaktifan kreatif manusia.

Segala pembangunan harus dijalankan dalam tanggungjawab terhadap keutuhan lingkungan hidup dalam solidaritas dengan generasi-generasi umat manusia yang akan datang (Magnis-Suseno, 1991:111). Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tetap menjaga kelangsungan historisitas manusia. Pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mementingkan kesejahteraan manusia sekarang dengan mengeksploitasi alam sampai habis, sehingga manusia yang akan datang dapat mengalami penderitaan, pembangunan seharusnya memakai prinsip menggunakan sumber daya alam sambil memelihara kelestariannya. Tanggungjawab manusia sekarang terhadap kelangsungan historisitas generasi berikutnya ialah dengan bertindak hati-hati sedemikian rupa sehingga akibat-akibat tindakan itu tidak merusak, bahkan membahayakan kehidupan manusia dan lingkungannya, baik bagi mereka yang hidup pada masa sekarang maupun generasi-generasi yang akan datang.

2. Hakikat dan Tujuan Pembangunan Nasional

Pengertian tentang pembangunan pada hakikatnya banyak tergantung pada bagaimana persepsi seseorang mengenai pembangunan itu sendiri. Secara eksistensial pembangunan mengacu pada negara-negara yang sedang membangun. Pembangunan pada hakikatnya bukanlah kemakmuran itu sendiri, bukan ideo-logi

membangun. Pembangunan pada hakikatnya bukanlah kemakmuran itu sendiri, bukan ideologi itu sendiri, tetapi rangkaian usaha dan proses kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terarah berdasarkan orientasi yang memberikan prinsip-prinsip normatifnya menuju ke masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan (Soerjanto Poespowardojo, 1989:137).

Falsafah pembangunan Indonesia adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Manusialah yang merupakan titik sentral dari segala upaya pembangunan. Manusia adalah subjek pembangunan, yaitu sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia di muka bumi ini, yang ingin dibangun adalah harkat dan martabatnya. Manusia juga adalah sumber daya pembangunan yang paling utama di antara sumber-sumber daya yang lain yang, yang ingin dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan (Ginandjar Kartasasmita, 1995:6).

Koento Wibisono (1983:102) menegaskan bahwa pengertian pembangunan di Indonesia seharusnya diletakkan dalam skala filsafati dan dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan yang hanya diletakkan sebagai sinonim dari 'development' pada skala yang teknis-naturalistik semata-mata, merupakan suatu kesalahan. Meletakkan pengertian 'pembangunan' dalam skala filsafati, akan membawa kepada pengertian bahwa 'pembangunan' merupakan upaya yang luas untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena manusia merupakan makhluk 'monopluralis', maka pembangunan di samping untuk memenuhi tuntutan kebutuhan fisik biologik, pembangun-an semestinya juga merupakan upaya untuk mengisi pemenuhan kebutuhan rohaninya, yaitu kebenaran, keindahan dan kesesuaian. Dengan demikian Pembangunan dalam rangka membangun manusia seutuhnya, berarti mengadakan upaya untuk memberi pemenuhan semua aspek kebutuhan rohani dan jasmani secara selaras, serasi dan seimbang.

Pembangunan merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang direncanakan atas dasar

tujuan-tujuan atau premis-premis nilai. Nilai-nilai yang merupakan tujuan dari pembangunan itu ialah: Pertama, kelangsungan hidup, artinya pembangunan harus menyediakan segala sesuatu yang dapat menjamin kelangsungan hidup setiap orang dalam masyarakat. Kedua, pengakuan atas martabat manusia, yaitu menciptakan atau memperbaiki kondisi kehidupan, sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan martabatnya. Ketiga, kebebasan, artinya pembangunan harus dapat membebaskan manusia dari segala macam perbudakan oleh alam, lembaga, kepercayaan, kebodohan dan sebagainya (Sastrapratedja, 1986:299). Ketiga tujuan itu harus ada dan saling berkaitan secara kreatif. Kebebasan untuk mengaktualisasikan diri hanya mungkin apabila ada kelangsungan hidup dan martabat manusia sebagai pribadi yang diakui. Kelangsungan hidup dan martabat manusia dikondisikan oleh kekuatan historis dan hanya dapat berkembang kalau ada kebebasan.

Pembangunan berarti ada modernisasi dan industrialisasi, ada teknologinya. Biasanya teknologi ditafsirkan sebagai hasil ilmu pengetahuan dan merupakan hasil gemilang kreativitas dan intensifitas dari kebebasan. Meskipun demikian hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya hasil kreativitas dan kebebasan manusia itu. Hal ini untuk menjaga agar ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak menguasai manusia (Toeti Heraty, 1986:339). Pembangunan yang berdasarkan Pancasila di satu pihak dapat memobilisasikan motivasi yang secara potensial ada dalam masyarakat, di lain pihak akan menolak segala cara yang tidak sesuai dengan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia tentang kemanusiaan yang universal (Magnis-Suseno, 1992:241). Dengan demikian hakikat pembangunan nasional tentu saja menggunakan sarana-sarana teknologi yang semestinya tidak hanya mencapai target kuantitatif berdasarkan peningkatan fisik, ekonomis menurut ukuran statistik-matematis. Hakikat Pembangunan semestinya selain dapat meningkatkan kebutuhan fisik masyarakat Indonesia, juga dapat

meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk spiritual.

Pembangunan dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya tak lain merupakan proyeksi dari kemampuan bangsa untuk menciptakan dengan keaktifan kreatifnya yang mengatasi batas-batas dirinya (Soedjatmoko, 1983:67). Artinya, tujuan pokok pembangunan sebenarnya ialah bagaimana membebaskan manusia Indonesia dari berbagai determinisme. Misalnya: kebodohan, kemiskinan, ketidak pastian masa depan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton, tt, *Filsafat Sejarah: Refleksi Sistematis*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Bertens, K., 1986, *Panorama Filsafat Modern*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Dister, Nico-Syukur, 1988, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Eka-Dharmaputera, 1992, *Pancasila Identitas Dan Modernitas*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Frederick, W.H., Soeri Suroto, 1982, "Mengenal, Memikirkan dan Mengarang Sejarah", dalam: William H. Frederick dan Soeri Suroto (eds.) *Pemahaman Sejarah Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Ginandjar-Kartasasmita, 1995, *Pembangunan Menuju Bangsa Yang Maju Dan Mandiri*, Pidato Penerimaan Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa, Universitas Gadjah Mada, 15 April 1995.
- Jacob, Teuku, 1991, *Masa Depan: Menyongsong Dan Mengubahnya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koento-Wibisono, 1983, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koento-Wibisono, 1986, "Ideologi Dan Pengusahaan Ilmu; Pengaruh Ideologi Terhadap Ilmuwan Dan Implikasinya Terhadap Pengusahaan Ilmu Hukum", dalam: Slamet Sutrisno (ed.), *Pancasila Sebagai Metode, Liberty*, Yogyakarta.
- Leahy, Louis, 1989, *Manusia Sebuah Mistery: intesa Filosofis Tentang Makhluk Paradoksial*, Gramedia, Jakarta.
- Magnis-Suseno, Franz, 1991, *Berfilsafat Dari Konteks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Magnis-Suseno, Franz, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1962, *Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1987, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, cetakan ketujuh, Bina Aksara, Jakarta.
- Peursen, C. A., B.H. Son, Koento Wibisono, J. Nchabeleng, 1980, *Toward A new Concept Of Development*, Leiden.
- Peursen, C.A., 1985, *Strategi Kebudayaan*, diindonesiakan oleh: Dick Hartoko, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

- Riberu, J., 1986, "Mencari Pedoman Etika Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila", dalam M. Sastrapratedja, J.Riberu dan Frans M. Parera (eds.), *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*, Gramedia, Jakarta.
- Rousseau, Jean Jacques, 1986, *Kontrak Sosial*, diterjemahkan oleh: Sumardjo, dari edisi Inggris, *The Social Contract*, (1947), Erlangga, Jakarta.
- Sartono-Kartodirdjo, 1971, *Messianisme Dan Millenarisme Dalam Sejarah Indonesia*, Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Yogyakarta.
- Sartono-Kartodirdjo, 1986, *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Sejarah Barat Dan Timur, Penjelasan Berdasarkan Kesadaran Sejarah*, PT Gramedia, Jakarta.
- Sartono-Kartodirdjo, 1990, *Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sastrapratedja, M. 1986, "Masalah Etis dari Perkembangan Ilmu dan Teknologi", dalam; M. Sastrapratedja, J. Riberu, dan Frans M. Parera (ed), *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*, PT Gramedia, Jakarta.
- Soedjatnoko, 1983, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Soedjatnoko, 1984, *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta.
- Soedjatnoko, 1985, *Pembangunan dan Kebebasan*, LP3ES, Jakarta.
- Soerjanto-Poespowardojo, 1989, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, PT Gramedia, Jakarta.
- Soerjanto-Poespowardojo, 1991, "Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama", dalam: Oetojo Oesman dan Alfian (eds), *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 1982, "Menggapai Filsafat Sejarah Nasional", dalam: William H. Federick dan Soeri Soeroto (penyunting), *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*, LP3ES, Jakarta.